

PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN LAMPUNG BARAT BERBASIS PENDAPAT MASYARAKAT

Weny Angraini

Weny.angraini@mail.ugm.ac.id

B.S. Eko Prakoso

bkoprakoso_y2k@yahoo.com

Abstract

This study aims to identify the type of Infrastructure Development is a priority community needs in the areas of research; compare Infrastructure Development plan formulated by policy makers Priority Infrastructure Development of the public in the area of research; formulating directives on Infrastructure Development based on the priority needs of the community in the research area. The method used is descriptive qualitative and quantitative descriptive (mix methods). The results showed that the Infrastructure Development Priorities in each area of research in priority order number 1 (one) have in common is type Roads Infrastructure, but which became the priority sequence number 2 (two), and three (3) there is a difference. In the study also found that planning for Infrastructure Development was formulated between public policy makers with a commonality. Additionally in this research community is hoping Infrastructure Development is a priority on the goal of 1 (one) can be used as a guide in the process of planning for the future Infrastructure Development Policy Stakeholders (Government).

Keywords: Priority, Development, Infrastructure, Society, Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis Pembangunan Infrastruktur yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat pada daerah penelitian; membandingkan perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang dirumuskan pemangku kebijakan dengan Prioritas Pembangunan Infrastruktur dari masyarakat pada daerah penelitian; merumuskan arahan rekomendasi Pembangunan Infrastruktur berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat pada daerah penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif (mix methods). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prioritas Pembangunan Infrastruktur pada masing-masing daerah penelitian dengan urutan prioritas nomor 1 (satu) memiliki persamaan yaitu Jenis Infrastruktur Jalan, namun yang menjadi urutan prioritas nomor 2 (dua), dan 3 (tiga) terdapat perbedaan. Pada penelitian ini juga menemukan bahwa perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang dirumuskan antara pemangku kebijakan dengan masyarakat memiliki persamaan. Selain itu pada penelitian ini masyarakat mengharapkan Pembangunan Infrastruktur yang menjadi prioritas pada tujuan 1 (satu) dapat dijadikan sebagai arahan dalam proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur kedepannya bagi Pemangku Kebijakan (Pemerintah).

Kata kunci: Prioritas, Pembangunan, Infrastruktur, Masyarakat, Pemerintah

PENDAHULUAN

Pembangunan Infrastruktur saat ini telah menjadi perhatian serius bagi setiap pemangku kebijakan (Pemerintah Daerah). Setiap daerah Kabupaten/Kota di Indonesia berlandaskan pada sistem pemerintahan Otonomi Daerah. Tujuan terbentuknya Otonomi Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk “mengatur sistem pemerintahannya sendiri yang mencakup perencanaan pembangunan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya secara partisipatif”.

Berdasarkan payung hukum yang jelas ini, seharusnya pemangku kebijakan (Pemerintah Daerah) mampu merealisasikan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada amanat Otonomi Daerah secara utuh guna mendukung terealisasinya partisipasi masyarakat dalam segala bidang pembangunan, salah satunya bidang perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang menjadi prioritas kebutuhan utama untuk menunjang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Karena pada dasarnya dengan adanya Infrastruktur yang mendukung pada suatu daerah, maka akan memberi pengaruh besar terhadap tumbuh kembangnya aktivitas sosial ekonomi, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu Caldero'n., dkk (2010:01) mengatakan bahwa ketersediaan yang cukup dari layanan infrastruktur telah lama dipandang oleh akademisi dan pembuat kebijakan sebagai bahan utama dalam pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang buruk umumnya dipandang sebagai salah satu kunci hambatan dalam pembangunan ekonomi Caldero'n., dkk (2010:24). Sedangkan pendapat yang dikatakan oleh World Bank (1994), McKinsey (2010), WEF (2009 dalam Ansar, 2012:823) menyetujui bahwa kehadiran dari infrastruktur yang luas adalah “*driver*” penting daya saing dari suatu daerah atau negara.

Selama ini proses perencanaan Pembangunan Infrastruktur daerah tidak selamanya sesuai dengan amanat terbentuknya sistem kebijakan Otonomi Daerah, hal ini terbukti dengan masih adanya proses perencanaan yang hanya melibatkan pemangku kebijakan (*top-down planing*) tanpa melibatkan masyarakat secara langsung (*bottom-up planing*). Pada akhirnya hanya akan menciptakan ketidaksinkronan antara keputusan pemangku kebijakan dengan kebutuhan masyarakat setempat mengenai Pembangunan Infrastruktur publik yang menjadi prioritas utama. Akibatnya perencanaan pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemangku kebijakan tidak terealisasi dan tidak sesuai target pencapaian keberhasilan. Fenomena ini sebenarnya telah menunjukkan bahwasanya perencanaan yang diputuskan oleh pemangku kebijakan tidak serta merta akan menjadi indikator keberhasilan perencanaan Pembangunan Infrastruktur di daerah. Hal ini tentunya sama seperti yang dikatakan oleh Abe dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Daerah Partisipatif”. Bahwa kegagalan dalam realisasi perencanaan lebih disebabkan tidak terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan Abe (2002:27). Bagaimana agar penyelenggaraan kekuasaan (pusat ataupun daerah) bisa memahami keinginan dan kebutuhan rakyat, tidak ada cara yang lebih baik kecuali bertanya langsung atau mendengarkan suara rakyat itu sendiri. Itulah substansi dari partisipasi masyarakat Abe (2002:35).

Prioritas Pembangunan Infrastruktur daerah berbasis pada pendapat masyarakat merupakan suatu bentuk proses perencanaan daerah secara partisipatif. Masyarakat dalam hal ini tentunya akan bersedia untuk berpartisipasi karena menyangkut pada perbaikan atas kehidupan mereka sendiri Somsup (1996 dalam Nuttavuthisit., dkk, 2014:56).

Perencanaan dengan konsep partisipasi masyarakat akan mampu menghadirkan suatu bentuk sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), dan lebih menekankan pada aspek pembangunan masyarakat. Intinya

perencanaan pembangunan secara partisipasi ini berimplikasi pada tidak lagi terisolasinya partisipasi masyarakat dari arus utama pembangunan (Warner, 1996:340). Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat yang dilakukan adalah untuk memahami, memprediksi, dan mengidentifikasi keputusan kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada kebutuhan yang dirasakan (Kibreab, 1999:136). Menurut Onyenemezu (2014:05) Partisipasi masyarakat merupakan aspek integral dari pembangunan masyarakat. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial di mana setiap orang hidup, berbagi kehidupan bersama mengenai lokasi geografis, karakteristik sosial-ekonomi, budaya, dan politik yang sama, serta memiliki perasaan kesatuan dan rasa memiliki yang memungkinkan mereka untuk mengejar satu tujuan pembangunan Onyenemezu (2014:01). Sedangkan Listyaningsih (2013:01) berpendapat bahwasanya heterogenitas masyarakat serta dinamika sosial yang sangat tinggi, menuntut adanya perencanaan pembangunan yang benar-benar berkorelasi dengan kebutuhan riil masyarakat.

Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukota Liwa adalah salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1991 tertanggal 16 Juli 1991 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1991, (Profil Kabupaten Lampung Barat, 2015). Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah dengan ketersediaan Infrastruktur yang berbeda setiap Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan masing-masing fasilitas Infrastruktur setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat memiliki tingkat pembangunan yang berbeda-beda.

Penelitian kali ini fokus pemilihan lokasi berdasarkan pada Sistem Perkotaan yang masuk dalam perencanaan Struktur Ruang Wilayah yang ada pada Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Barat (2010-2030

dalam BAPEDDA Lampung Barat, 2012) bahwasanya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Lampung Barat terletak pada Kota Liwa Kecamatan Balik Bukit; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak pada Kecamatan Way Tenong yaitu Fajar Bulan; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) salah satunya terletak pada Kecamatan Belalau yaitu Kenali; dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) salah satunya terletak pada Kecamatan Batu Ketulis yaitu Bakhu. Alasan dipilihnya seluruh lokasi ini adalah mengingat Sistem Perkotaan yang terdiri dari PKW, PKL, PPK, dan PPL yaitu berfungsi sebagai pemberi pelayanan mulai dari pelayanan kegiatan pada skala Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Pekon, sedangkan disisi lain Pembangunan Infrastruktur adalah hal yang berkaitan dengan proses penyediaan pelayanan dasar yang memiliki tujuan sebagai pendukung fungsi pusat-pusat kegiatan pada Sistem Perkotaan demi terciptanya kelancaran aktivitas sosial ekonomi. Maka akan sangat tepat apabila dalam proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur tersebut melibatkan masyarakat secara langsung sesuai dengan hal yang menjadi prioritas kebutuhan, seperti yang dilakukan pada penelitian kali ini. Selain itu hasil dari penelitian ini kedepannya dapat dijadikan acuan bagi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur kedepannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian mengenai Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lampung Barat Berbasis Pendapat Masyarakat ini tergolong dalam penelitian deskriptif. Menurut Nosanchuk (1977:3-9 dalam Effendi, 2012:05) pendekatan deskriptif adalah dimaksudkan untuk mengukur dengan cermat fenomena sosial tertentu atau preferensi terhadap politik tertentu.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1991 tertanggal 16 Juli 1991 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1991 (Profil Kabupaten Lampung Barat, 2015). Kabupaten Lampung Barat setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat secara administratif meliputi 15 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 131 Pekon, dengan luas wilayah 3.368,14 km² (BPS Lampung Barat, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat langsung di Peta Administrasi Kabupaten Lampung Barat pada Gambar 1 (satu).

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif dan kuantitatif (*mix-methods*) akan tetapi lebih ditekankan pada pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:08) metode penelitian kualitatif bersifat holistik dan lebih menekankan kepada proses. Sedangkan metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang terukur dengan bentuk data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2008:07). Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

a) Teknik Observasi

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi. Teknik Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati lokasi yang telah dipilih berdasarkan Sistem Perkotaan yang terdiri dari Kecamatan yang tergolong dalam PKW, PKL, PPL dan PPK di Kabupaten Lampung Barat. Adapun jenis teknik observasi yang dipilih yaitu teknik observasi sistematis. Menurut (Sukandarrumidi, 2002:72) teknik observasi sistematis merupakan jenis

observasi berkerangka dibuat oleh peneliti yang memuat faktor-faktor yang telah di atur terlebih dahulu. Adapun Instrumen yang digunakan untuk observasi ini di antaranya adalah *checklist*, alat tulis, dan kamera.

b) Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit (Sugiyono, 2008:137).

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian (kuesioner) secara tertulis dan alternatif dari jawabannya telah dipersiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan teknik ini pengumpul data dapat menggunakan pewawancara lainnya sebagai pengumpul data (Sugiyono, 2008:233). Teknik wawancara ini dipilih berdasarkan pertimbangan agar informasi terkait jenis pembangunan infrastruktur prioritas yang didapatkan memang sesuai dengan apa yang menjadi pendapat dari responden.

c) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, peraturan, kebijakan dan lain-lain (Sugiyono, 2008:240).

d. Teknik Pemilihan Responden

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih responden yang dapat mewakili jenis prioritas pembangunan infrastruktur pada Pusat Kegiatan Kabupaten Lampung Barat berbasis pendapat masyarakat khususnya pada PKW (Kota Liwa/kecamatan Balik Bukit); PKL (Fajar Bulan/ kecamatan Way Tenong); PPK (Kenali/ kecamatan Belalau); dan PPL

(Bakhu/kecamatan Batu Ketulis) di Kabupaten Lampung Barat. Pemilihan responden dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan dan jumlah sampel tidak dipersoalkan, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian (Sukandarrumidi, 2002:65). Adapun responden yang dipilih yaitu :

- a. Masyarakat yang dipilih sebagai responden yang akan diwawancarai adalah masyarakat dalam kategori dewasa pada 4 (empat) Sistem Perkotaan terpilih di Kabupaten Lampung Barat dengan status umur diatas 21 (dua puluh satu) tahun menurut (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan mengetahui kondisi pembangunan infrastruktur serta lingkungan di sekitarnya.
- b. Instansi yang dipilih sebagai responden yaitu instansi-instansi/lembaga terkait yang memiliki dokumen kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur.

Jumlah dari responden pada setiap lokasi penelitian (Kecamatan) terpilih adalah 30 (tiga puluh) hal ini didasari oleh pendapat yang dikatakan Baiky (1982 dalam Sukandarrumidi, 2002:54) bahwa penelitian yang menggunakan analisis data dengan statistik jumlah sampel paling sedikit adalah 30 (tiga puluh). Selain itu juga pemilihan jumlah responden yang hanya 30 (tiga puluh) didasari oleh pertimbangan waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti.

e. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang disesuaikan dengan masing-masing tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif. Analisis data secara induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2008:09). Berdasarkan hasil analisis data primer maupun sekunder, kemudian

dikelompokkan dari setiap responden sehingga diperoleh kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini juga dilakukan dengan cara analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:147) analisis dengan cara statistik deskriptif yaitu teknik analisis mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya untuk menjawab permasalahan penelitian.

f. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu dalam bentuk Deskripsi, Tabel, dan Peta yang disesuaikan pada setiap masing-masing tujuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Jenis Pembangunan Infrastruktur yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat pada daerah penelitian.

Jenis Pembangunan Infrastruktur yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat berdasarkan data yang diperoleh pada daerah penelitian yang meliputi (Kecamatan Balik Bukit/ PKW; Kecamatan Way Tenong/ PKL; Kecamatan Belalau/ PPK; dan Kecamatan Batu Ketulis/ PPL) masing-masing yaitu terdiri dari 3 (tiga) Jenis Prioritas Pembangunan Infrastruktur. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur pada PKW yaitu terdiri dari:
 - 1) Infrastruktur Jalan (Jalan Lingkungan dan Jalan Kabupaten) 52%.
 - 2) Infrastruktur Energi Kelistrikan (Listrik) 27%.
 - 3) Infrastruktur Konservasi Energi (Penerangan Jalan Umum) 10%.
2. Prioritas Pembangunan Infrastruktur pada PKL yaitu terdiri dari:
 - 1) Infrastruktur Jalan (Jalan Lingkungan dan Kabupaten) 86%.
 - 2) Infrastruktur sumber daya air (PDAM) 11%.
 - 3) Infrastruktur pengelolaan persampahan (tempat pembuangan sampah) 3%.

3. Prioritas Pembangunan Infrastruktur pada PPK yaitu terdiri dari:
 - 1) Infrastruktur Jalan (Jalan Kabupaten dan Lingkungan) 81%.
 - 2) Infrastruktur Pendidikan (TK) 8%.
 - 3) Infrastruktur Irigasi 5%.
4. Prioritas Pembangunan Infrastruktur pada PPL yaitu terdiri dari:
 - 1) Jenis Infrastruktur Jalan (Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan) 37%.
 - 2) Infrastruktur Energi Kelistrikan (Listrik) 22%.
 - 3) Infrastruktur Pendidikan (SMA/SMK) 13%.

3 (tiga) Jenis Pembangunan Infrastruktur yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat pada masing-masing daerah penelitian ini untuk lebih jelasnya juga dapat dilihat di Peta Prioritas Pembangunan Infrastruktur Pada Daerah Penelitian di Kabupaten Lampung Barat pada Gambar 2 (dua).

b. Perbandingan perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang dirumuskan pemangku kebijakan dengan prioritas Pembangunan Infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat pada daerah penelitian.

Berdasarkan Data RPJPD, RPJMD, RKPD di Kabupaten Lampung Barat Prioritas Pembangunan Infrastruktur pada ke 4 (empat) Sistem Perkotaan terpilih yang terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kecamatan Balik Bukit, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kecamatan Way Tenong, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kecamatan Belalau, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kecamatan Batu Ketulis telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dibuktikan dengan hasil analisis terkait Permasalahan Infrastruktur salah satunya yang terdapat pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017 menunjukkan bahwasanya permasalahan di bidang infrastruktur

meliputi belum terbangun sistem drainase yang baik pada beberapa kawasan, kurangnya jangkauan jaringan listrik, terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana di beberapa kawasan permukiman, rendahnya daya dukung sarana prasarana jalan. Dimana Permasalahan Infrastruktur ini nantinya akan dituangkan menjadi perencanaan strategis prioritas pembangunan infrastruktur kedepannya. Begitu pula yang dijelaskan dalam dokumen RPJPD dan RKPD apa yang dijelaskan tidak jauh berbeda dengan Prioritas Pembangunan Infrastruktur apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Untuk rincian lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel 1 (satu).

c. Arahkan rekomendasi Pembangunan Infrastruktur berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat pada daerah penelitian.

Prioritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013 dalam Departemen Pendidikan Nasional, 2013) adalah mendahulukan atau mengutamakan sesuatu dari pada yang lain. Sedangkan Pembangunan merupakan suatu usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu Negara, dan diselenggarakan secara sadar oleh pemerintah bersama dengan masyarakatnya menuju suatu pembinaan bangsa. Pembangunan diarahkan untuk mencapai dua sasaran utama, sasaran tersebut ialah angka pertumbuhan dan didukung adanya pemerataan pendapatan Siagian (1997 dalam Safi'i, 2009:02). Untuk mencapai kedua sasaran tersebut sangat diperlukannya dukungan dari Infrastruktur yang memadai pada suatu daerah dan disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakatnya. Karena apa yang biasanya menjadi kebutuhan mendesak adalah hal yang berkaitan dengan apa yang mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi dari masyarakatnya agar dapat tercipta pertumbuhan dan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan bahwasanya Infrastruktur dapat didefinisikan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Prioritas Pembangunan Infrastruktur daerah berbasis pada pendapat masyarakat merupakan suatu bentuk proses perencanaan daerah secara partisipatif. Masyarakat dalam hal ini tentunya akan bersedia untuk berpartisipasi karena menyangkut pada perbaikan atas kehidupan mereka sendiri Somsup (1996 dalam Nuttavuthisit., dkk, 2014:56). Sedangkan menurut Sunarjo (1984:31 dalam Chairina, 2013:22) pendapat/ opini dianggap sebagai jawaban lisan dari individu yang memberi respon (tanggapan) terhadap suatu hal pertanyaan yang diajukan.

Selama ini Pemangku Kebijakan (Pemerintah) pada dasarnya telah mewadahi masyarakat dengan adanya musrenbang yang dilakukan setiap tahunnya guna memenuhi aspirasi kebutuhan masyarakat termasuk didalamnya terkait Pembangunan Infrastruktur yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara cepat mengingat jangka waktu RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun dan dilaksanakan dengan RKPD pada setiap tahunnya atau 1 (satu) tahun sekali. Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada masyarakat didapatkan jenis prioritas pembangunan infrastruktur yang dapat dijadikan sebagai arahan rekomendasi pada 4 (empat) Sistem Perkotaan terpilih. Bentuk arahan rekomendasi tersebut adalah berupa jenis pembangunan infrastruktur yang masuk kedalam 3 (tiga) jenis prioritas pembangunan infrastruktur yang telah dijelaskan pada tujuan penelitian pertama yang diantaranya:

1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur pada PKW yaitu terdiri dari:

- 1) Infrastruktur Jalan (Jalan Lingkungan dan Jalan Kabupaten) 52%.
 - 2) Infrastruktur Energi Kelistrikan (Listrik) 27%.
 - 3) Infrastruktur Konservasi Energi (Penerangan Jalan Umum) 10%.
2. Prioritas Pembangunan Infrastruktur pada PKL yaitu terdiri dari:
- 1) Infrastruktur Jalan (Jalan Lingkungan dan Kabupaten) 86%.
 - 2) Infrastruktur sumber daya air (PDAM) 11%.
 - 3) Infrastruktur pengelolaan persampahan (tempat pembuangan sampah) 3%.
3. Prioritas Pembangunan Infrastruktur pada PPK yaitu terdiri dari:
- 1) Infrastruktur Jalan (Jalan Kabupaten dan Lingkungan) 81%.
 - 2) Infrastruktur Pendidikan (TK) 8%.
 - 3) Infrastruktur Irigasi 5%.
4. Prioritas Pembangunan Infrastruktur pada PPL yaitu terdiri dari:
- 1) Jenis Infrastruktur Jalan (Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan) 37%.
 - 2) Infrastruktur Energi Kelistrikan (Listrik) 22%.
 - 3) Infrastruktur Pendidikan (SMA/SMK) 13%.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang telah disebutkan merupakan hal yang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini mengharapkan agar Prioritas Pembangunan Infrastruktur tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai arahan dalam proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur kedepannya bagi Pemangku Kebijakan (Pemerintah) di Kabupaten Lampung Barat, dan berdasarkan Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD bahwasanya secara keseluruhan telah mewakili Jenis Infrastruktur Prioritas dari masyarakat yang ada pada 4 (empat) Pusat Kegiatan terpilih pada Sistem Perkotaan yang diatur dalam Struktur Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Lampung Barat 2010-2030.

Lanjutan Tabel 1 Perbandingan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang dirumuskan Pemangku Kebijakan (Pemerintah) dengan Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang dibutuhkan Masyarakat

No	Prioritas Pembangunan Infrastruktur Menurut Masyarakat Pada Daerah Penelitian Terpilih	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Menurut Rumusan Pemerintah	Lokasi	Persamaan dan Keterangan
		perdesaan: ✓ Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan. ✓ Pembangunan jalan lingkungan perdesaan. ✓ Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan perdesaan. ✓ Kegiatan penyusunan database jalan lingkungan.	Tersebar dikabupaten Lampung Barat	
		13. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana dalam bentuk sedang/berat total puskesmas/ puskesmas pembantu.	Tersebar di kabupaten Lampung Barat Puskesmas, puskesmas pembantu dan poskesdes di kab. Lampung Barat	
		14. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS.	RSUD Liwa	
		15. Program sarana pengembangan perumahan dan lingkungan sehat (tempat sampah, sanitasi, dll)	Tersebar di kabupaten Lampung Barat	
		16. Program penambahan dan pembangunan, rehabilitasi PAUD, SD, SMP, SMA/SMK	Tersebar di kabupaten Lampung Barat	

Sumber: Dokumen RPJPD kabupaten Lampung Barat (2005-2025 dalam BAPEDDA Lampung Barat, 2013); Dokumen RPJMD kabupaten Lampung Barat (2012-2017 dalam BAPEDDA Lampung Barat, 2013); Dokumen RKPD kabupaten Lampung Barat (2016 dalam BAPEDDA Lampung Barat, 2015); (Data hasil lapangan, 2016)

KESIMPULAN

1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur menurut masyarakat pada daerah penelitian masing-masing yaitu terdiri dari 3 (tiga) jenis prioritas. Urutan prioritas nomor 1 (satu) memiliki persamaan yaitu Jenis Infrastruktur Jalan (Jalan Kabupaten dan Lingkungan), namun yang menjadi urutan prioritas nomor 2 (dua), dan 3 (tiga) terdapat perbedaan.
2. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang dirumuskan oleh Pemangku Kebijakan (Pemerintah) telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan utama Prioritas Pembangunan Infrastruktur menurut masyarakat pada daerah penelitian.
3. Arahkan rekomendasi pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat pada daerah penelitian masing-masing yaitu terdiri dari 3 (tiga) jenis prioritas pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah disebutkan pada tujuan penelitian 1 (satu) dan dipaparkan kembali pada tujuan 3 (tiga).

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Ansar, Atif. 2012. Location Decisions of Large Firms: Analyzing The Procurement of Infrastructure Services. *Journal of Economic Geography*. Vol 13 .Pp. 823–844.
- BAPEDDA Lampung Barat. 2012. *Perda Kabupaten Lampung Barat No. 1 Tentang RTRW Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030*. Lampung Barat: BAPEDDA.
- BAPEDDA Lampung Barat. 2013. *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat 2005-2025*. Lampung Barat: BAPEDDA.
- BAPEDDA Lampung Barat. 2013. *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat 2012-2017*. Lampung Barat: BAPEDDA.

- BAPEDDA Lampung Barat. 2015. *Dokumen RKPD Kabupaten Lampung Barat 2016*. Lampung Barat: BAPEDDA.
- BPS Lampung Barat. 2014. *Lampung Barat Dalam Angka 2015*. Lampung Barat: Badan Pusat Statistik.
- Caldero'n, Ce'sar., Luis Serve'n., The World Bank. 2010. Infrastructure and Economic Development in Sub-Saharan Africa. *Journal Of African Economies*. Vol 19. Pp i 13-215.
- Chairina, Husni, A. 2013. Skripsi *Opini Publik Di Media Sosia Twitter (Analisis Ini Opini Kekerasan Seksual Pada Anak)*. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Kibreab, Gaim. 1999. The Consequences of Non-participatory Planning: Lessons from a Livestock Provision Project to Returness in Eritrea. *Journal of Refugee Studies*. Vol 12. No. 2. Pp. 136-160.
- Listyaningsing. 2013. Prioritas Pembangunan Kota Serang Berbasis Pada Kebutuhan Masyarakat Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Niagara*. Vol. V No. 4.
- Nuttavuthisit, Krittinee., Jindahra, Pavitra., Prasarnphanich. 2014. Participatory Community Development: Evidence From Thailand. Oxford University Press. *Community Development Journal*. Vol 50. No. 1. Pp. 55-70.
- Onyenemezu, Chidi E. 2014. The Imperative of Citizen's Participation in Community Development. *Scholarly Journals*. Vol 5. Pp 209-215.
- Safi'i, HM. 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)* Malang: Averroes Press.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. . Yogyakarta : Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Warner, Michael. 1996. Strategic Planning at the Community Level: A Modification to Participatory Planning. *Community Development Journal*. Vol. 31. No. 4. Pp. 330-342.
- Website**
- Profil Kabupaten Lampung Barat. 2015. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Di akses Oleh Weny Angraini melalui <http://www.lampungbaratkab.go.id/index.php/design-and-features> pada tanggal 19 Maret 2015. Pukul 23:16 wib.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.